

PERGUMULAN PARTAI POLITIK ISLAM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN: MASYUMI TUMBANG, NU MELENGGANG, PSII BIMBANG

Muhammad Rijal Fadli*

Pendidikan Sejarah, Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

Abstract

This article aims to review the struggle of Islamic political parties during the guided democracy era. The research method used is historical with a literature study approach. The results of the study explain that in Indonesia's history, records regarding the democratic order that brought President Soekarno to the top of his highest government, namely from 1957 to 1965. The role of Indonesian democracy did not only decline but almost changed to become a dictator. In the end, Soekarno's guided democracy idea was responsive from Indonesian political activists, including from Islamic political parties. Soekarno's idea, the Islamic political party pursued a two-sided path, one side firmly rejected and one side supported it. This difference in interests has brought the two camps into a political struggle during the guided democracy era. The contra group represented by Masyumi got the impact of their ideology with the dissolution of this party. Meanwhile, support groups such as NU even gained political triumph during the guided democracy era.

Keywords: Politics; Islam; Democracy; Indonesia.

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengulas kembali tentang pergumulan partai politik Islam masa demokrasi terpimpin. Metode penelitian yang digunakan adalah historis dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menjelaskan dalam sejarah Indonesia mencatat mengenai tatanan demokrasi yang membawa presiden Soekarno ke puncak pemerintahan tertingginya, yakni pada masa 1957 hingga 1965. Peranan demokrasi Indonesia tidak hanya menurun, melainkan hampir saja berganti menjadi diktator. Pada akhirnya gagasan demokrasi terpimpin Soekarno memunculkan responsif dari para penggiat politik Indonesia, termasuk dari partai politik Islam. Dalam menanggapi gagasan Soekarno, partai politik Islam menempuh jalan bersibak dua, satu sisi menolak tegas dan satu sisi mendukungnya. Perbedaan kepentingan ini telah membawa kedua kubu ke dalam pergumulan politik pada masa demokrasi terpimpin. Kelompok kontra yang diwakili oleh Masyumi mendapat imbas dari ideologi mereka dengan dibubarkannya partai ini. Sedangkan kelompok pendukung seperti NU malah mendapatkan kejayaan politik pada masa demokrasi terpimpin.

Kata Kunci: Politik; Islam; demokrasi; Indonesia.

PENDAHULUAN

Setelah merdeka pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak langsung menjadi negara yang solid dengan tatanan negara mapan. Belanda telah meninggalkan jejak birokrasi yang sulit dalam menentukan sistem pemerintahan yang cocok untuk Indonesia. Tercatat periode Orde Lama, Indonesia sudah berganti-ganti sistem pemerintahan, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi parlementer hingga demokrasi terpimpin.

Pada tanggal 5 Juli 1959, kabinet pemerintahan mengadakan perkumpulan di Bogor dihadiri oleh ketua Mahkamah Agung. Saat itu terjadi proses kesepakatan supaya UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali dengan melalui dekrit, dengan keadaan darurat nasional sebagai pembenaran legal (Bathoro, 2018, p. 26). Pasca mengumumkan Dekrit Presiden pada Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet barunya menggantikan Kabinet Djuanda (Nurdamarsah, 2018). Dengan ini, Soekarno mengumumkan peralihan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Kabinet ini dinamai Kabinet Kerja yang bertugas melaksanakan gagasan Soekarno. Demokrasi terpimpin telah membawa

*Correspondance Author: rijalfadli.co@gmail.com

Article History | Submitted: August 13, 2020 | Accepted: August 19, 2020 | Published: August 21, 2020

How to Cite (APA 6th Edition style):

Fadli, M.R. (2020). Pergumulan Partai Politik Islam pada Masa Demokrasi Terpimpin: Masyumi Tumbang, NU Melenggang, PSII Bimbang. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 34-49.

DOI: [10.30829/juspi.v4i1.7927](https://doi.org/10.30829/juspi.v4i1.7927)

Soekarno ke puncak kekuasaan yang ia dambakan. Namun sayang, pondasi yang Soekarno tancapkan kurang kokoh, sehingga sistem yang ia bangun justru menghancurkannya.

Presiden Soekarno melalui pidatonya tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” menerangkan bahwa butir-butir pokok demokrasi terpimpin ada dalam dua kategori yaitu: (1) Setiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, dan negara; (2) Setiap orang mendapatkan kehidupan yang layak dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Soekarno, 1976, p. 372).

Ideologi yang diusung oleh Soekarno untuk mengusung kabinet barunya dikenal dengan istilah Nasakom yang berarti Nasionalis, Sosialis, dan Komunis. Soekarno berusaha menyatukan ketiga paham yang dianut oleh bangsa Indonesia masa itu. Ketika itu, Nahdlatul Ulama, sebagai partai politik Islam terbesar menjadi manifestasi dari paham sosialis. Namun pada perjalanannya, ide Nasakom tidak dapat berjalan lancar justru menjadi bumerang baginya. Posisi partai politik Islam di parlemen juga jadi kurang menentu, sehingga eksistensinya kalah dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga eksistensi partai politik Islam dalam Nasakom patut untuk dibahas dalam hal ini.

Konsep pemikiran Soekarno tentang Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965) ternyata tidak hanya pemikiran politik yang muncul secara tiba-tiba, namun merupakan konsep pemikiran yang telah ia rumuskan sejak tahun 1920-an. Pada masa mudanya Soekarno telah memiliki cita-cita besar menggabungkan tiga ideologi yang saat itu sangat berpengaruh dan memiliki akar yang kuat di kalangan kaum pergerakan (Argenti, 2017).

Kepercayaan pemikiran yang sinkretismenya ini tetap Soekarno pertahankan sampai pada akhir hayatnya. Menurutnya persatuan menjadi suatu pedoman yang penting serta menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Fachrurozi, 2016). Bahkan secara terang-terangan di hadapan publik, dalam sebuah pidato Soekarno mengaku bahwa darahnya adalah darah Nasakom, pidato yang disampaikan dalam acara pembukaan Kongres Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 16 September 1959 itu, Soekarno secara terbuka mengatakan bahwa dirinya masih memegang ideologi campuran yang menurutnya dapat dipandang aneh oleh orang-orang lain, dari situlah dapat dilihat betapa konsistennya Soekarno pada ajarannya (Soyomukti, 2012, p. 160-162).

Dalam proses masa perkembangannya, muncul sistem demokrasi terpimpin dengan ditandainya berbagai macam gejala yang telah muncul di era Demokrasi Liberal (1950-1959), terutama tertuju pada arah nasional kita yang tidak jelas karena lebih banyak pertikaian politik antar elite baik di pusat maupun daerah. Demokrasi liberal ini malah membawa malapetaka politik berupa konflik daerah akibat kesenjangan ekonomi dan gejala akibat adanya liberalisasi politik yang membuat berbagai elemen dan kekuatan politik terutama partai politik terfragmentasi secara ekstrim dalam dinamika yang tidak sehat tanpa memperdulikan arah bersama dalam membangun cita-cita tersebut (Ilmar, 2018, p. 9). Dengan demikian, dalam sistem

demokrasi terpimpin justru malah terjadi konflik-konflik yang tidak jelas seperti berebut kekuasaan, semua parpol ingin menang sendiri sehingga dapat merugikan bangsa. Maka sangat perlu untuk dibahas dalam artikel ini pergumulan parpol Islam pada masa demokrasi terpimpin.

METODE DAN FOKUS PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan *historical method* (metode sejarah). Metode ini merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa masa lampau, melalui empat tahapan kerja, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (eksternal/bahan dan internal/isi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan kisah sejarah) (Kuntowijoyo, 2013, p. 43). Metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan sintesis-sintesis hasil-hasil yang telah dicapainya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis". Garragan yang dikutip dari (Daliman, 2012, p. 27), sehingga dalam proses penggunaa metode sejarah penulis menggunakan empat tahapan dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan terakhir historiografi (Hamid & Madjid, 2012). Penulis mencari sumber primer dan skunder diperoleh dari perpustakaan instansi yang berkompeten, seperti Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Perpustakaan Universitas Gajah Mada dan Universitas Negeri Yogyakarta, Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta dan dari sejumlah artikel dalam jurnal ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai Politik Islam Sebelum Demokrasi Terpimpin

Sebelum masa demokrasi terpimpin sebenarnya Soekarno sudah ingin kritis ketatanegaraan Indonesia dengan sistem parlementer. Sistem tersebut dalam menjalankan pemerintahannya semua berada ditangan Perdana Menteri beserta para kabinetnya, sedangkan keberadaan kepala negara atau presiden hanya sebagai simbol sebagai pemersatu bangsa pada saat itu, sehingga tidak memiliki wewenang dalam berpolitik. Saat itulah Soekarno terus berupaya untuk menggantikannya dengan sistem baru, pada akhirnya Soekarno sebagai Presiden Indonesia mampu mengalihkannya sistem parlementer menjadi sistem presidensial (Indrajat, 2016). Kritik Soekarno terhadap sistem parlementer ini sudah muncul sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Namun, pada tahun 1930-an Soekarno sudah memberikan pernyataan bahwa sistem demokrasi parlementer kurang cocok diterapkan di Indonesia untuk masa mendatang.

Soekarno telah mencetuskan konsep demokrasiya dikenal dengan sosio-demokrasi, secara komprehensif dijelaskan bagaimana seharusnya pemerintahan negara itu dilaksanakan. Dengan begitu sangat wajar pemikiran Soekarno saat itu lebih mengarah kepada perjuangan kemerdekaan nasional, sehingga pada fase kemerdekaan Soekarno telah kembali menekankan secara lebih jelas tentang konsep demokrasiya (Subkhan, 2018).

Soekarno berpendapat Indonesia telah menganut prinsip musyawarah, suatu pertukaran ide-ide di antara kekuatan-kekuatan politik yang mewakili masyarakat, sehingga nantinya dapat menghasilkan kata mufakat atau konsensus bersama (Dahm,

1987, p. 246). Sikap kritisi Soekarno tersebut memperlihatkan perasaan antipatinya terhadap segala hal yang berhubungan dengan budaya Barat, sebab semua itu adalah bentuk dari hegemoni barat untuk mempertahankan kolonialisme dan imperialismenya di kawasan Asia Afrika.

Pada tahun 1956, Soekarno mulai berani melakukan sikap konfrontasinya, diluapkan pada saat berpidato di depan kongres persatuan guru. Soekarno menyatakan bahwa kebobrokan-kebobrokan sistem demokrasi parlementer yang selama ini ia anggap menjadi sumber utama munculnya krisis politik yang berlarut-larut, sehingga ia mengusulkan sistem demokrasi baru yang berasal dari kebudayaan asli Indonesia yaitu demokrasi terpimpin (Nugroho, 2015).

Gagasan demokrasi terpimpin Soekarno sudah terlihat sejak pada awal tahun 1957. Pada rapat “Merah Putih” pada 27 Januari 1957 di Bandung, Soekarno mengungkapkan keinginannya untuk mencampuri pemerintahan dalam masa peralihan. Setelah itu pada 21 Februari 1957, Soekarno mengundang seluruh kabinet, tokoh-tokoh ibukota, kepala-kepala partai, dan perwira-perwira tentara ke Istana Negara di Bogor. Ia mengungkapkan gagasan untuk membentuk suatu kabinet dengan partisipasi seluruh partai termasuk PKI. Disebutkan pula pembentukan suatu Dewan Nasional yang terdiri dari wakil-wakil buruh, petani, intelektual, pendeta Katholik, ulama Islam, dan angkatan 45 serta akan memimpin sendiri Dewan Nasional (Noer, 1987, p. 353).

Soekarno telah menawarkan dua konsep sebagai jalan keluar dari jeratan sistem demokrasi versi Barat. Dua konsep di antaranya: (1) pembentukan Dewan Nasional, yang terdiri dari perwakilan dari seluruh lapisan yang ada di dalam masyarakat termasuk memasukan unsur fungsional dan militer; (2) pembentukan kabinet gotong royong dengan memasukan seluruh kekuasaan-kekuasaan politik yang ada di parlemen (Feith & Castles, 1988, p. 63-72). Konsep demokrasi terpimpin benar-benar dikenalkan oleh Soekarno kepada publik dalam pidato peringatan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1958 di Jakarta. Menurutnya, bangsa Indonesia harus belajar pada kegagalan demokrasi liberal. Kebebasan berekspresi dianggap gagal karena kebablasan dengan banyaknya pemberontakan, maka dalam menghadapi bangsa asing yang menggerogoti bangsa, dibutuhkan suatu konsep demokrasi yang layak, yaitu demokrasi terpimpin (Soyomukti, 2012, p. 73).

Pasca pertemuan tersebut, para petinggi partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) melakukan perkumpulan guna untuk merespons sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut bentuk dari kebijakan pro PKI Soekarno yang meresahkan berbagai macam pihak. September 1957, Masyumi mengadakan Mukhtamar ulama se-Indonesia di Palembang yang menyimpulkan bahwa komunisme itu haram bagi umat Islam, sehingga PKI harus bubarkan (Ricklefs, 2008, p. 392). Perlawanan lain terlihat dari para petinggi Masyumi, melalui artikelnya, yang terbit pada 1 Maret 1957, Natsir mengemukakan bahwa ada dua alasan fundamental penolakan Masyumi terhadap gagasan presiden, di antaranya pertama terletak pada hakekat demokrasi itu sendiri. Natsir mengatakan tidak ada perbedaan Barat dan Timur, sebab demokrasi merupakan sesuatu yang universal (Ahmad, 2013). Ia menolak segala dalih nilai-nilai “ketimuran” yang diusung Soekarno. Baginya, demokrasi hanya mungkin dipimpin oleh

nilai-nilai luhur yang diakui Barat maupun dunia Islam. Alasan kedua terkait dengan kemungkinan partisipasi PKI dalam pemerintahan (Madinier, 2013, p. 221). Pro dan kontra atas kebijakan Soekarno dapat menimbulkan masalah baru dalam sistem pemerintah Indonesia, sehingga banyak terjadinya pergolakan antara pemerintah dan parpol terutama parpol Islam.

Setyahadi (Setyahadi, 2018) menyatakan bahwa Pasca Soekarno mempublikasi sikap kritisnya terhadap sistem demokrasi parlementer dan multipartai dalam pidatonya, kondisi politik semakin panas, sehingga pada saat itu muncul terjadinya pergolakan dalam badan Konstituante dan Parlemen. Hal ini, telah membuka kesempatan bagi Soekarno untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan mengambil tindakan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi: (1) Pembubaran Konstituante; (2) Berlakunya Kembali UUD 1945; (3) Tidak berlakunya UUDS 1950; (4) Pembentukan MPRS dan DPAS.

Dampak dari dekrit tersebut telah terjadi pembubaran DPR dan MPR hasil pemilu 1955, yang digantikan dengan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat sendiri oleh Presiden Soekarno. Dengan demikian, pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong diangkat sebagai menteri koordinator dan menteri dalam kabinet.

Dampak lain, partai Masyumi beberapa bulan sebelum Dekrit 5 Juli, sudah bisa melihat sikap positif Nahdlatul Ulama (NU) dalam menghadapi politik demokrasi terpimpin. Pada 11 Januari 1959, Soekarno mengadakan pertemuan dengan partai-partai. Salah satu wakil NU, Zainul Arifin, mengatakan "... semua orang tahu pendirian NU, yaitu sejuta dengan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, musyawarah ini menunjukkan sikap akomodatif NU dalam demokrasi terpimpin" (Ma'arif, 1998, p. 57). Saifuddin Zuhri, tokoh NU membawakan dalil yang populer di kalangan pesantren sebagai dalil pembenaran NU masuk dalam demokrasi terpimpin. "*Man laa yudraku kulluhu, laa yutraku ba'duhu*" (Apa yang tidak dapat diraih seluruhnya, sebagian yang dapat diraih jangan dilepaskan) (Ma'arif, 1996, p. 57). Konsepsi lain mengenai persetujuan NU terhadap demokrasi terpimpin datang dari Idham Cholid, melalui pidato pertanggungjawabannya pada Kongres NU ke-22 bulan Desember 1959 di Jakarta, ia menyatakan sikap akomodatifnya terhadap kebijakan Soekarno. Menurutnya, demokrasi terpimpin sesuai dengan nilai-nilai Islam, asalkan ada dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur musyawarah yang menghargai pimpinan, dan unsur pimpinan yang menghargai musyawarah. Maka dari itu, faktor utama dalam demokrasi terpimpin adalah musyawarah terpimpin (Muhajir, 2007, p. 58).

Di sisi lain terdapat satu partai politik Islam lain yang seharusnya lebih berpengalaman dalam kancah perpolitikan Indonesia, yaitu Partai Sosialis Islam Indonesia (PSII), karena PSII pernah bergumul dengan PKI pada dekade dua hingga abad ke-20. Namun kenyataannya, dalam beberapa keputusan mereka mengenai politik Soekarno, mereka lebih banyak mengekor pada NU. PSII terlalu banyak bergulat dengan pepecahan politik dan trauma politik, berubah menjadi partai kecil tanpa kekuatan berarti. Setelah memisahkan diri dengan ideologi Marxisme, partai ini meredup hingga tidak bisa memainkan perannya seperti tahun 1916. PSII sebagai partai politik tertua tidak lagi menjadi perhitungan bagi lawan-lawannya. Pemisahan diri

dengan Masyumi pada 1947, menambah trauma bagi partai ini. Pada 1947, Amir Syarifuddin yang hendak mengembalikan PSII sebagai partai politik tersendiri, tidak bisa menjaga eksistensi partai ini. Sebenarnya jika dilihat dari paham keagamaan Indonesia, PSII termasuk dalam golongan Islam moderat. Namun ideologi martir Masyumi sangat riskan untuk diikuti. Apalagi melihat posisi mereka yang lemah. Untuk itu menyesuaikan diri dengan gaya politik NU merupakan jalan yang realistis untuk PSII (Ma'arif, 1996, p. 55).

Dampak dari sikap Masyumi terlihat dalam usaha pengerdilan Masyumi dari peta politik Indonesia ketika Presiden Soekarno berkeinginan untuk membentuk kabinet baru. Bahkan, Presiden memberlakukan keadaan darurat perang atau *Staat von Oorlog en Beleg* (SOB) pada 14 Juni 1957 atas usulan dari Panglima TNI, Nasution. Hal ini diambil menyusul meletusnya pemberontakan Perjuangan Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Samual di Makassar pada 2 Maret 1957. Langkah tersebut memudahkan Soekarno untuk mengambil alih kekuasaan dan memberantas pemberontakan (Fealy & Platzdasch, p. 2005). Keesokan harinya, Presiden menunjuk Suwiryo, ketua Partai Nasional Indonesia (PNI), menjadi formatur kabinet barunya. Pada masa pembentukan, Masyumi tidak diikutsertakan dalam kabinet. Pada prosesnya, Soekarno menarik kembali mandatnya dari Suwiryo, dan membentuk kabinetnya sendiri. Kabinet yang diketuai oleh Djuanda dan dikenal dengan nama Kabinet Karya diumumkan tanggal 8 April 1958. Maka dengan terbentuknya Kabinet Djuanda, Masyumi tergeser ke pinggir percaturan politik yang baru (Madinier, 2013, p. 223-224).

Perbedaan jalan antara partai politik Islam mengenai kebijakan Presiden Soekarno terlihat jelas dalam pembentukan kabinet Djuanda. Menurut Masyumi, prosedur yang digunakan oleh Presiden dalam membentuk bertentangan dengan UUD 1945. Maka Masyumi melarang anggotanya untuk turut serta dalam kabinet dan mengambil tindakan tegas atas pelanggaran. Pangeran Muhammad Noor, yang menjadi Menteri pekerjaan umum, dikeluarkan dari Masyumi, dan Muljadi, yang diangkat menjadi Menteri Sosial, mengundurkan diri (Ishaqro, 2015). Sedangkan dari kubu NU, mereka membiarkan anggotanya untuk duduk dalam parlemen. Pengurus Besar NU sepakat untuk memberi kesempatan kepada kabinet untuk menjalankan tugasnya. Meski demikian, beberapa tokoh NU menolak pendirian kabinet, salah satunya Imron Rosjadi. Tetapi ia tidak mempunyai pengaruh apapun dalam NU, untuk PSII malah memperlihatkan kebimbangan mereka. Di satu sisi PSII mengancam keikutsertaan partisipasi anggota mereka, Sudibjo, dalam kabinet, namun di sisi lain menunjukkan dukungannya terhadap presiden (Mustapa & Syi'aruddin, 2020).

Kedua pandangan tersebut kemudian memunculkan dua visi dalam menghadapi demokrasi terpimpin Soekarno. Kedua visi tersebut memunculkan dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok Liga Demokrasi yang dibentuk pada 24 Maret 1960. Liga Demokrasi ditokohi oleh figur-figur yang berasal dari Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Katholik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan dua tokoh NU, yaitu KH. M. Dachlan dan Imron Rosjadi. Kelompok pertama muncul sebagai penentang demokrasi terpimpin. Liga ini dibentuk sebagai protes atas dibubarkannya DPR pilihan rakyat 1955, namun strategi

jangka panjangnya adalah melawan strategi politik Soekarno. Sayangnya, Liga Demokrasi tidak berumur panjang. Saat pendirian liga demokrasi, Soekarno sedang berada di luar negeri. Sekembalinya dari luar negeri, Soekarno langsung membubarkan Liga Demokrasi. Sehingga dalam beberapa bulan, Liga Demokrasi bubar tanpa ada yang bisa mempertahankan (Ricklefs, 2008, p. 406). Kelompok kedua, Liga Muslimin yang terdiri dari tokoh NU, PSII, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI). Mereka muncul sebagai kelompok pendukung gagasan Soekarno ini (Ma'arif, 1998, p. 64-65).

Demokrasi Terpimpin dan Dualisme Partai Politik Islam

Era demokrasi terpimpin berlangsung pada tahun 1959-1966. Konfigurasi politik yang ditampilkan yaitu konfigurasi seperti sistem otoriter. Partai-partai politik tidak leluasa, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), parpol lain tidak mempunyai peran aktif politik yang sangat berarti, sehingga kekuatan terbesar terletak pada Presiden Soekarno (Sanusi, 2018). Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, dimulailah periode Demokrasi Terpimpin ala Soekarno di Indonesia. Soekarno juga mengumumkan kabinet barunya menggantikan Kabinet Djuanda yang dinamai Kabinet Kerja pada 22 Juli 1959. Kabinet inilah yang bekerja untuk melaksanakan gagasan Soekarno dalam bentuk demokrasi terpimpin. Selain pembentukan kabinet, ia juga membentuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada 15 Agustus 1959 yang bertugas memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usulan terhadap pemerintah (Ma'arif, 1996, p. 49; Poesponegoro & Notosusanto, 2011, p. 419).

Keluarnya Dekrit Presiden membawa dampak besar terhadap kondisi perpolitikan di Indonesia. Semua akses dalam menyelesaikan permasalahan di dalam Konstituante semuanya dihentikan dengan dekrit tersebut, sehingga Konstituante dinyatakan dibubarkan dan UUD 1945 telah berlaku kembali. Konsideran Dekrit menyebutkan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dalam rangkaian kesatuan dengan UUD 1945. Hadirnya Dekrit sebenarnya ingin mengambil atau mencari jalan tengah. Tapi dekrit itu sendiri menandai bermulanya suatu era baru, yaitu Demokrasi Terpimpin (Ma'afi, 2014, p. 85).

Seminggu setelah dikeluarkannya dekrit 5 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinetnya yang baru, menggantikan Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda yaitu kabinet peralihan dari periode Demokrasi Parlementer ke Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan demokrasi kekeluargaan, tanpa adanya keanarkian liberalisme, tanpa otokrasinya diktator. Maksudnya bahwa demokrasi telah mendasarkan terhadap sistem pemerintahannya hasil dari musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan sesepuh yang tidak diktator, tetapi memimpin dan mengayomi (Sanusi, 2018). Arti dari sesepuh menuju kepada para orang tua pada saat itu, karena Soekarno mempunyai peran sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia sehingga ia menerima nasehat-nasehat dari orang-orang yang lebih tua. Secara terselubung ternyata konsep-konsep dari sesepuh mempunyai cakupan pandangan politik yang cukup jauh dari nalar Soekarno sendiri (Adib & Qomari, 2018).

Asas pemerintahan demokrasi terpimpin adalah Manipol-Usdek. Asal usul istilah tersebut berasal dari pidato Soekarno dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang disampaikan pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun 1959. Naskah

pidato inilah yang disahkan menjadi sebuah doktrin kenegaraan oleh Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebagai “Manifestasi Politik Indonesia (Manipol)”. Pokok-pokoknya berisi UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, yang kemudian disingkat menjadi Usdek. Inilah Garis besar haluan negara yang di sahkan oleh DPA sebagai pedoman demokrasi terpimpin. Gagasan tersebut digunakan oleh Soekarno untuk mengarahkan Indonesia ke situasi revolusioner dengan mengeksplorasi doktrin-doktrin tersebut (Soyomukti, 2012, p. 74; Poesponegoro & Notosusanto, 2011, p. 420).

Ideologi demokrasi terpimpin terlepas dari pelaksanaannya sehingga dianggap otoriter, padahal demokrasi terpimpin dianggap sebagai suatu alat untuk mengatasi perpecahan yang selalu muncul di permukaan politik Indonesia dalam pertengahan tahun 1950-an. Maka dari itu, untuk menggantikan pertentangan antara partai-partai di parlemen, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan di mana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Soekarno memberlakukan kembali konstitusi presidensial tahun 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat dari angkatan darat (Juwono, 2017). Akan tetapi, Soekarno menyadari bahwa keterikatannya dengan tentara dapat membahayakan kedudukannya, sehingga ia mendorong kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang militer. Soekarno terus berusaha mengumpulkan kekuatan politik yang telah bersaing terhadap demokrasi terpimpin dengan harapan kekuatan yang dikumpulkan mampu membantu untuk mengembangkan ketercapaiannya kesadaran akan tujuan-tujuan nasional. Soekarno menciptakan sebuah ideologi nasional dengan harapan seluruh warga memberi dukungan terhadap presiden (Mikail, 2018). Di situ Pancasila ditekankan oleh Soekarno dan disusupi dengan doktrin-doktrin seperti Manipol-Usdek dan Nasakom. Dalam dukungannya ternyata mendapat dukungan luas dari berbagai masyarakat, apalagi dari kelompok kecil sipil terdiri dari PKI dan NU, NU disini ikut gabung mewakili dari golongan agama.

Pada pidato Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1960, Soekarno menancapkan tonggak demokrasi terpimpin. Presiden menyarankan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung, Badan Perancang Nasional, Badan Pengawas Penertiban Aparatur Negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Front Nasional. Semua lembaga tersebut, hanya DPR dan MPR yang disebut dalam UUD 1945. Tidak seperti sebelumnya, penetapan anggota MPR dan DPR ditetapkan oleh Presiden yang merupakan sebuah pelanggaran dalam demokrasi. Bahkan kedudukan MPR, yang merupakan badan tertinggi menurut UUD 1945, berada di bawah kendali Soekarno (Noer, 1987, p. 367).

Kembali pada masalah dualisme pandangan partai politik Islam dalam menilai politik yang diterapkan oleh Soekarno. Buku yang ditulis oleh M. Mansyur Amin, dikatakan bahwa bagi NU, pada saat itu yang penting adalah masuk dulu, kalau memang kurang tepat maka keluar. Alasannya adalah melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak bisa dari luar. Posisi Soekarno yang didukung PKI dan militer dirasa terlalu kuat, untuk itu mengikuti permainan adalah jalan yang paling realistis (Amin, 1996, p. 222).

Pandangan berbeda ditempuh oleh Masyumi. Bagi Masyumi, masalahnya tidak terletak pada keuntungan atau tidak. Dalam pandangan Masyumi, demokrasi terpimpin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia. Karena, sistem Soekarno harus dilawan apapun akibat yang akan dialami (Ma'arif, 1996, p. 54). Masyumi menyatakan demokrasi terpimpin Soekarno tidak lagi bersifat universal, alasan lainnya ditulis dalam artikel Natsir, bahwa adanya bahaya dari PKI yang ia sebut sebagai kuda Troya dalam demokrasi Soekarno ini.

Dalam pandangan partai Masyumi demokrasi bukan hanya semata-mata cara yang dapat diubah setiap waktu menurut keadaan, demokrasi itu sebagai jalan atau pandangan hidup. Dengan begitu menanggapi kekacauan politik yang melanda di Parlemen dan Majelis Konstituante, Masyumi menyatakan bahwa implementasi demokrasi adalah sebagai suatu sistem yang terkadang sukar, karenanya menuntut pengalaman dan harus pula melalui berbagai cobaan yang harus dihadapinya walaupun itu pahit (Gedacht, 2017). Oleh sebab itu Masyumi tidak serta merta menyalahkan sistem Demokrasi Liberal atau multipartai yang telah diterapkan, melainkan penekanan pada koreksi diri dari tokoh-tokoh partai politik yang menjadi biang kekacauan politik (Ahmad, 2013, p. 3; Muliati, 2015).

Imbas dari ideologi Masyumi terlihat ketika pembentukan DPR Gotong Royong pada 20 Maret 1959 menggantikan DPR 1955. Masyumi dan PSII tidak mendapatkan satupun kursi dalam DPR dari bentukan Soekarno ini. Padahal lebih dari separuh kursi (154) jatuh ke tangan golongan-golongan fungsional. Begitu pula ketika pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang beranggotakan 616 orang, Masyumi juga PSI tidak mendapati wakil mereka di lembaga manapun (Ricklefs, 2008, p. 403).

Konsepsi presiden tentang demokrasi telah memunculkan pro dan kontra dari partai-partai seperti PNI, PKI, Baperki dan Murba menyokongnya dengan serta merta berupa pernyataan-pernyataan tercetak, rapat-rapat umum, pengiriman delegasi dan lain-lain. Sedangkan partai-partai agama, seperti partai Masyumi, Partai NU, PSII dan Partai Katholik menolaknya karena menganggap konsepsi tersebut telah menyinggung masalah yang fundamental berhubungan dengan susunan ketatanegaraan yang seharusnya menjadi wewenang Konstituante (Asroni, 2011).

Akhir tahun 1959 presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden No.7/1959. Penpres ini tujuannya lebih mengarah pada langkah untuk menyingkirkan Masyumi. Bersinyalir di dalam pasal 9 bahwa presiden setelah mendengar pendapat dari Mahkamah Agung dapat melarang atau membubarkan partai yang sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta dalam pemberontakan-pemberontakan atau jelas memberikan bantuan sedangkan partai tidak resmi menyalahkan perbuatan-perbuatan anggota-anggotanya (Nihaya, 2016). Dengan dikeluarkannya penpres tersebut telah memberi signal kepada Masyumi bahwa hal tersebut semacam bombastis, karena sebelumnya tidak dilibatkan dalam kabinet kerja, DPA, Dewan Perancang Nasional, dengan demikian Masyumi dalam eksistensinya di gelanggang politik nasional telah terancam.

Dari sudut lain Soekarno telah membentuk suatu logika revolusi yang digunakan untuk melengserkan eksistensinya Masyumi di kancah nasional, yaitu dengan membenturkan sikap penolakan Masyumi terhadap ide Nasakom sehingga dapat menghilangkan kesetiaan kepada azas dan tujuan negara, yakni Pancasila dan UUD 1945. Soekarno menyatakan:

“Siapa yang setuju kepada Pancasila, harus setuju kepada Nasakom; siapa yang tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada Pancasila! Sekarang saya tambah: Siapa setuju kepada UUD 1945 harus setuju kepada Nasakom, siapa tidak setuju kepada Nasakom, sebenarnya tidak setuju kepada UUD 1945” (Ma’arif, 1996, p. 104).

Masyumi telah menyatakan sikap penolakan terhadap ide Nasakom, dengan menggunakan logika revolusi di atas secara tidak langsung menyeretnya kepada kriteria seperti yang ditetapkan pada Bab IX Pasal 9 dari Penpres No.7/1959 yaitu sikap yang bertentangan dengan azas dan tujuan negara (Ahmad, 2013).

Sikap keras Masyumi merespons rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno malah membawanya ke jurang kehancuran. Sikap ketiga partai Islam lainnya, NU, PSII, dan Perti, menjadi pukulan bagi Masyumi. Presiden Soekarno tidak hanya berhasil mengisolasi Masyumi dari kabinet, melainkan juga dari sesama rekannya di partai Islam. Masa itu menjadi permulaan gelap bagi umat Islam. Proses kristalisasi politik Soekarno berjalan mulus dengan dikeluarkannya keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada 17 Agustus 1960. Keputusan ini berisi pembubaran Masyumi dan PSI. Maka pada 13 September 1960, pemimpin Masyumi menyatakan partainya bubar (Nurdamarsah, 2018).

Pembubaran Masyumi merupakan dampak dari gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau juga dikenal dengan nama Pemerintahan Rakyat Semesta (Permesta) di Sumatra. Pada tanggal 9 dan 10 Januari 1958 di Sungai Dareh, sebuah kota kecil di Sumatra Tengah, para pemimpin Masyumi berkumpul memenuhi undangan Letnan Kolonel Husein, salah satu petinggi militer yang berkonfrontasi melawan pemerintah. Para petinggi Masyumi yang terlibat adalah M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap. Mereka sepakat ingin membendung komunisme di Indonesia. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana tindak lanjut gerakan mereka (Ricklefs, 2008). Akhirnya pada tanggal 15 Februari 1958, diumumkan satu pemerintahan pemberontak di Sumatera dengan markas di Bukittinggi, yang dikenal dengan nama PRRI. Mereka menginginkan dibubarkannya Kabinet Djuanda dan menunjuk Hatta dan Hamengkubuwono IX untuk membentuk kabinet kerja baru. Soekarno yang baru pulang dari luar negeri menolak pemerintahan tersebut. Gerakan PRRI ini mendapat respon cepat dari pihak militer. Pada tanggal 5 Mei 1959, militer berhasil melumpuhkan Bukittinggi dan mengakhiri pemberontakan ini. Pemberontakan ini telah menodai citra Masyumi dan dengan cap pengkhianat.

Padahal secara dokumen politik, Masyumi tidak mempunyai hubungan organisatoris dalam peristiwa PRRI/Permesta. Hanya segelintir tokoh Masyumi, seperti Natsir, Syarifuddin dan Burhanuddin Harahap yang berperan. Itu pun peran mereka hanya sebagai pemberi landasan teoritik bagi perjuangan PRRI untuk menekan

pemerintahan. Ketidakikutsertaan Masyumi terhadap gerakan PRRI/Permesta terlihat dalam usaha beberapa petinggi lainnya yang cenderung menolak gagasan pemerintahan revolusioner tersebut. Sebelum pemerintahan tandingan berdiri, petinggi Masyumi yang diwakili Mohammad Roem, Prawoto, serta Fakih Usman datang ke Bukittinggi guna mencari jalan penyelesaian pertikaian kaum revolusionis dengan pemerintah. Namun karena besarnya tekad tokoh revolusi yang hanya mau berkompromi jika tuntutannya diterima, mereka gagal membujuknya (Munhanif, 2012).

Perlu diketahui, umat Islam mendapat kerugian dalam DPR gotong royong. Kursi yang dimiliki oleh Islam merosot 48 kursi. Sebaliknya, kaum Nasionalis dan komunis mendapat keuntungan, masing-masing naik 29 kursi dan 39 kursi (Fealy & Platzdasch, 2005). Bahkan pengaruh komunis semakin terasa. Dua orang wakil PKI berhasil menduduki jabatan wakil ketua di dua sistem politik buatan Soekarno itu. Dari sinilah dapat diketahui, bahwa PKI lah yang mendapat keuntungan terbesar dalam sistem ini.

Dengan dibubarkannya Masyumi, NU menjadi partai Islam terbesar dan komponen utama Nasakom milik Soekarno. Sebenarnya, pengaruh NU dalam Nasakom (Nasionalis, Sosialis, dan Komunis) semakin menipis sama halnya Partai Nasional Indonesia (PNI), dengan terpusatnya pemerintahan pada Presiden, tentara, dan PKI. Ketiga unsur tersebut menjadi pemain utama dalam demokrasi terpimpin (Fadli & Sudrajat, 2020). Nasakom adalah sebuah kerja sama yang hendak menyatukan kaum nasionalis, agamis, dan komunis. Jargon tersebut dipopulerkan oleh Soekarno pada akhir 1960. Golongan Islam hanyalah untuk meramaikan jargon Nasakom. Pada dasarnya, peran partai Islam telah terpinggirkan. Meski demikian, NU masih dapat menggunakan posisinya untuk membangun struktur organisasi dan membendung pergerakan PKI (Hidayatullah, 2012, p. 911).

Terdapat beberapa alasan keikutsertaan NU ke dalam demokrasi terpimpin. Alasan pertama adalah kedekatan para tokoh NU dengan Soekarno. Selain Saifuddin Zuhri yang telah disebutkan di atas, terdapat nama KH. Wahab Chasbullah dan KH. Idham Chalid (Hidayatullah, 2012). Mereka berdua adalah figur mutlak yang menentukan warna politik NU. KH. Wahab Chasbullah dari syuriah yang bertugas untuk mencari pembenaran agama dari keputusan politik yang diambil NU, sedangkan KH. Idham Chalid, dari Tanfidziyah, bertugas sebagai pelaksana praktis dari keputusan-keputusan yang diambil syuriah (Muhajir, 2007, p. 93). Bahkan dapat dikatakan, kedua tokoh tersebut mempunyai andil besar untuk 'ketuk palu' keputusan dalam keikutsertaan NU dalam kabinet Gotong royong. KH. Wahab Hasbullah berkali-kali menegaskan untuk ikut serta terlebih dahulu dalam sistem politik tersebut. Ia berhasil menggalang dukungan dari kelompok pragmatis NU. Untuk menentramkan golongan garis keras, ia berjanji akan menolak bekerja sama dengan PKI, dan akan keluar jika terbukti kinerja pemerintahan tidak memuaskan (Noor, 2016).

Alasan kedua ialah alasan pragmatis keinginan NU untuk menduduki jabatan Menteri Agama. Jabatan tersebut memang sudah menjadi incaran NU sejak masa kemerdekaan, jauh sebelum menjadi partai politik. Pada jabatan inilah orang-orang NU merasa leluasa sebagai jalur politik NU yang efektif. Lewat jalur inilah NU dapat berkomunikasi dengan massanya sekaligus meluaskan pengaruhnya ke seluruh negeri. Terbukti pasca Dekrit Presiden 1959, jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahib

Wahab hingga Februari 1962. Tetapi karena tuduhan penyelewengan devisa negara, Wahib digantikan oleh KH. Saifuddin Zuhri hingga 1967 (Ma'arif, 1998, p. 99).

Alasan lain dalam keterlibatan NU dan PSII disebabkan oleh kharisma Soekarno sendiri. Pihak PSII menilai hubungan Presiden dengan keluarga Tjokroaminoto sebagai sebuah ikatan. Soekarno pernah menjadi ipar Anwar dan Harsono sekitar tahun 1920-an. Sedangkan NU menggunakan pertimbangan agama dalam keterikatan mereka terhadap Presiden. Soekarno digelari sebagai *waly al amri dhoruri bi al syawkah* oleh NU pada 1953. Gelar tersebut digunakan sebagai simbol agama untuk dukungan terhadap hijrah dan ijtihad Soekarno dalam Demokrasi Terpimpin. Wahib Wahab menegaskan konsep hijrah untuk menafsirkan pergantian UUDS 1950 dengan UUD 1945. Soekarno juga dianggap telah melakukan ijtihad dengan Manipol-Usdek-nya (Noer, 1987, p. 405-406).

Berdasarkan uraian di atas bahwa pada masa Demokrasi Terpimpin banyak sekali terjadi gejolak politik di Indonesia terutama pada partai politik Islam. Di mana partai politik Islam ini memang sangat berpengaruh sekali dalam mendapatkan masa dari masyarakat, maka Soekarno selalu merangkul orang-orang dari parpol Islam ini. Di dalam parpol Islam terdapat beberapa partai besar di antaranya Masyumi, NU, PSI dan lain sebagainya. Namun ketiga parpol Islam ini bersaing sengit untuk mendapatkan dukungan dari Soekarno. Dengan begitu dari masing-masing parpol ini melakukan tindakan-tindakan politiknya supaya mendapat dukungan tersebut. Pada saat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mulai permasalahan-permasalahan bertubi-tubi datang akibat sistem demokrasi gaya baru Soekarno yang diterapkan. Singkatnya, parpol Masyumi setelah Dekrit dikeluarkan ternyata Masyumi tidak menyetujuinya sehingga Masyumi keluar, namun berbeda dengan NU di mana tetap berada di pihak Soekarno sedangkan PSI masih bimbang untuk ikut serta pada siapa. Sehingga pada akhirnya NU di sini menjadi partai besar saat itu, akibat Masyumi dibubarkan. Jadi dalam hal ini kontestan dimenangkan oleh NU yang telah mendapatkan kedudukan sebagai partai besar di Parlemen. Sesuai dengan tema bahwa Masyumi telah tumbang NU melenggang pesat sedangkan PSI bimbang mau ikut ke dalam kelompok siapa. Ini dilihat dari sisi periode (1959-1966) pasca kemerdekaan sampai masa Soekarno habis.

Jika dilihat dari substansinya bahwa Indonesia sudah mengamini demokrasi yang telah merangsang dalam pertumbuhan dan pergerakan partai-partai politik di tingkat lokal maupun nasional. Walaupun di situ pemimpin-pemimpin partai sepakat tentang penerapan demokrasi di Indonesia, banyak varian makna tentang demokrasi yang muncul berikutnya sering menjadi dasar bagi partai-partai politik agar dapat memenangkan penerapannya dengan sepenuhnya di tingkat nasional. Dengan catatan ini bahwa terdapat beberapa partai politik tertentu yang menganggap beberapa partai yang lainnya sedang memanfaatkan penerapan demokrasi di Indonesia sebagai bagian dari cara untuk memperoleh kekuasaan yang pada gilirannya bertujuan untuk mengubah ideologi negara, yakni Pancasila. Oleh karena itu, terkadang mesin partai yang dimiliki di daerah-daerah dapat dimanfaatkan dalam rangka upaya kemenangan dalam sistem demokrasi tersebut (Wirayuda, 2016).

Interpretasi hasil dari peristiwa ini pada dasarnya berpijak pada teori belah bambu pada masa demokrasi terpimpin, di mana pada saat Soekarno menginginkan

konsep demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai Ideologinya seperti Nasakom guna mengubah sistem pemerintahan Indonesia agar lebih maju dan berkembang. Namun kenyataannya hal tersebut menimbulkan pro dan kontra, di mana partai politik Islam terpecah belah ada yang mendukung dan ada yang kurang setuju. Masyumi hadir sebagai parpol Islam yang tidak mendukung sistem pemerintahan yang telah diusung oleh Soekarno, telah mengalami kehancuran di dalam partainya, akibatnya Masyumi pun resmi dibubarkan oleh Soekarno berdasarkan keputusan Presiden No. 200/1960. Di sisi lain PSII bimbang karena terlalu banyak bergulat di kancah perpolitikan membuat PSII trauma, PSII yang biasanya tampil terdepan dan terbesar dalam kancah politik Indonesia justru menjadi kecil tanpa ada kekuatan sedikit pun. Sedangkan di parpol lain dari NU justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, karena telah mendukung sistem yang diusung oleh Soekarno. Dalam perkembangan NU menjadi Parpol besar efek dibubarkannya Masyumi, sehingga NU kokoh dan mendapatkan banyak kursi di parlemen pemerintahan.

Teori belah bambu ini maksudnya pergulatan partai politik yang semula terpadu dan menyatu pada akhirnya harus dibelah, yang satu diangkat dan yang lainnya diinjak. Keterbaruan dari artikel ini, dimana pada masa demokrasi terpimpin banyak parpol Islam yang menolak atas sistem pemerintahan baru yang telah diusung oleh Soekarno, hal tersebut telah menjadi bomerang bagi parpol yang tidak mendukungnya seperti Masyumi yang berseri keras menolaknya justru dibubarkan melalui Kepres. Sedangkan Parpol yang mendukungnya mendapat kursi/posisi yang menjajikan di parlemen seperti Parpol NU, NU menjadi parpol besar semenjak dibubarkannya Masyumi, atas dukungannya NU terhadap pemerintah.

Relevansinya di era demokrasi saat ini tetap menjadi warisan turun menurun teori belah bambu ini, padahal dalam kontestasi elektoral sistem demokrasi dapat merusak falsafah demokrasi itu sendiri. Namun, hal tersebut memang sulit untuk dihindari karena adanya berbagai macam manuver untuk memenangkan perhelatan kekuasaan, sehingga para kontestan cenderung menggunakan segala cara apapun untuk memenangkan pertarungan di parlemen, cara tersebut dikenal dengan strategi belah bambu. Tujuannya adalah untuk memecah belah pendukung lawan politiknya. Strategi politik ini dilakukan guna basis-basis pendukung lawan politik pecah, sehingga basis politik pendukung akan diberikan kursi diparlemen. Dengan demikian, harapannya hal tersebut harus dihapus dalam sistem demokrasi saat ini agar bisa *downgrade* elektabilitas lawan politik.

PENUTUP

Dalam menghadapi gagasan demokrasi terpimpin, partai-partai Islam mempunyai dualisme pandangan. Para penganut Islam moderat yang diwakili Masyumi memilih jalan kontra terhadap gagasan tersebut. Masyumi beserta PSI, Parkindo, dan IPKI membentuk Liga Demokrasi sebagai wadah aspirasi mereka untuk menentang gagasan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Imbas dari ideologi martir Masyumi adalah tidak diikutsertakannya mereka dalam kabinet Gotong Royong yang dibuat oleh Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Imbas yang lebih tragis adalah dibubarkannya partai tersebut menyusul dikeluarkannya keputusan Presiden No. 200/1960 yang diumumkan pada 17 Agustus 1960. Langkah lain ditempuh oleh Nahdlatul Ulama adalah NU memilih

untuk kooperatif dalam menyikapi kebijakan politik Soekarno ini. Bagi mereka, yang penting adalah masuk dulu, kalau memang kurang tepat keluar. Untuk melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* tidak bisa dari luar. Posisi Soekarno yang terlalu kuat sangat riskan untuk ditentang. Untuk itu, NU bersama PSII dan Perti mendirikan Liga Muslimin sebagai massa pendukung gagasan demokrasi terpimpin. Sikap NU membawa partai tersebut ke puncak politik mereka. NU sebagai partai Islam terbesar menjadi wakil Islam dalam gagasan Nasakom milik Soekarno. NU mendudukkan 36 wakilnya dalam kabinet Gotong Royong bentukan Soekarno. Mereka juga dapat merebut kembali kursi Menteri Agama yang sudah mereka idam-idamkan, sehingga bisa dikatakan Masyumi tumbang, NU lenggang.

REFERENSI

- Adib, M., & Qomari, N. (2018). Arus Baru Politik Islam: Pluralisme, Kontestasi, dan Demokratisasi. *MAQASHID*, 1(2), 18–33. Retrieved from <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/129>.
- Ahmad, Z. M. (2013). Sikap Politik Soekarno Terhadap Partai Masyumi 1957-1960. *Indonesian Journal of History Education*, 2(2), 1–14. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijhe/article/view/2192>.
- Amin, M. M. (1996). *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Jakarta: Al Amin.
- Argenti, G. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 22–32. Retrieved from <https://doi.org/10.35706/jpi.v2i2.960>.
- Asroni, A. (2011). Pemikiran Ahmad Syafii Maarif tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia. *Millah*, 10(2), 12–29. Retrieved from <https://doi.org/10.20885/millah.vol10.iss2.art8>.
- Bathoro, A. (2018). Redupnya Peran Politik Islam Di Masa Demokrasi Terpimpin (Studi Kasus Pembubaran Masyumi Oleh Presiden Soekarno). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 24–41. Retrieved from <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/757>.
- Dahm, B. (1987). *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.
- Daliman. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Fachrurozi, M. H. (2016). Revolusi Demokrasi: Suatu Gagasan Memperbaiki Demokrasi Indonesia. *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 45–55. Retrieved from <https://doi.org/10.21831/moz.v8i1.10768>.
- Fadli, M. R., & Sudrajat, A. (2020). Keislaman dan kebangsaan: telaah pemikiran KH. Hasyim Asy'ari. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 109–130. Retrieved from <https://doi.org/10.18592/khazanah.v18i1.3433>.
- Fealy, G., & Platzdasch, B. (2005). The Masyumi Legacy: Between Islamist Idealism and Political Exigency. *Studia Islamika*, 12(1), 1–34. Retrieved from <https://doi.org/10.15408/sdi.v12i1.646>.
- Feith, H., & Castles, L. (1988). *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*. Jakarta: LP3ES.
- Gedacht, J. (2017). Islam and politics in Indonesia: the Masyumi Party between democracy and integralism. *Journal Asian Studies Review*, 41(2), 322–324. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/10357823.2016.1202177>.
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2012). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hidayatullah, S. (2012). The Consolidation of The Islamic Traditionalism: A Case Study

- of The Nahdatul Ulama. *Prosiding the 4th International Conference on Indonesian Studies: "Unity, Diversity, and Future,"* 934–942.
- Ilmar, A. (2018). Demokrasi Terpimpin Dalam Pemikiran dan Praktik Politik. *Jurnal Polinter*, 4(1), 1–15. Retrieved from <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/polhi/article/view/1276/866>.
- Indrajat, H. (2016). Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno Tentang Demokrasi. *Jurnal Sosiologi*. Retrieved from <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Ishaqro, A. H. (2015). Dinamika Partai Masyumi Pada Masa Revolusi Fisik (1945-1949). *Agastya: Jurnal Sejarah dan Pembelajarannya*, 5(2), 90–104. Retrieved from <https://doi.org/10.25273/ajsp.v5i02.885>.
- Juwono, V. (2017). The History of Governance Reform and the Anti-corruption Measure under Guided Democracy era: Indonesia experience in 1957 – 1967. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 24(2), 57–68. Retrieved from <https://doi.org/10.20476/jbb.v24i2.9491>.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Ma'afi, R. H. (2014). Politik Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan Hingga Demokrasi Terpimpin. *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 3(1), 77–95. Retrieved from <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.77-95>.
- Ma'arif, S. (1996). *Islam dan Politik Indonesia: Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.
- Ma'arif, S. (1998). *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani.
- Madinier, R. (2013). *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Jakarta: Mizan.
- Mikail, K. (2018). Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia: Menanti Kebangkitan Partai Politik Islam di Tahun 2019. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam*, 15(1), 107–148. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tamaddun/article/view/444>.
- Muhajir, A. (2007). *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*. Yogyakarta: LKiS.
- Muliati, I. (2015). Pandangan M. Natsir Tentang Demokrasi: Kajian Pemikiran Politik Islam. *Jurnal Tingkap*, 11(2), 44–57. Retrieved from <http://103.216.87.80/index.php/tingkap/article/view/6201>.
- Munhanif, A. (2012). Ties that would Divide': Explaining the NU's Exit from Masyumi in 1952. *Studia Islamika*, 19(2), 334–357. Retrieved from <https://doi.org/10.15408/sdi.v19i2.36338>.
- Mustapa, H., & Syi'aruddin, M. A. (2020). Creative Understanding Dalam Progressivisme Pemikiran Islam Politik Syafruddin Prawiranegara (1911-1989): Sebuah Pendekatan Komunikasi. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 3(1), 12–25. Retrieved from <https://doi.org/10.20414/POLITEA.V3I1.1721>.
- Nihaya. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Jurnal Sulesana*, 10(2), 109–127. Retrieved from <https://doi.org/10.24252/.v10i2.2932>.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Temprint.
- Noor, F. (2016). Islamic Party and Pluralism: The View and Attitude of Masyumi towards Pluralism in Politics (1945-1960). *Al-Jami'ah*, 54(2), 273–310. Retrieved from <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.273-310>.
- Nugroho, H. (2015). Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual

- Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1(1), 90–100. Retrieved from <https://doi.org/10.22146/jps.v1i1.23419>.
- Nurdamarsah, T. (2018). Politik Masyumi di Masa Demokrasi Parlementer 1950-1959. *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 1(1), 21–28.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2011). *Sejarah Nasional Indonesia jilid IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Pustaka.
- Sanusi, A. (2018). Pemikiran Transformatif Soekarno dalam Politik Islam (Pendekatan Transformatif Bill Gould, Karl Stenbrink, dan Kontowijoyo). *Jurnal Empower*, 3(2), 57–77. Retrieved from <https://doi.org/10.24235/empower.v3i2.3510>.
- Setyahadi, M. M. (2018). Analisis Konflik Politik Elite TNI pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). *Jurnal Renaissance*, 3(1), 1–20. Retrieved from <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/72>.
- Soekarno. (1976). *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid II*. Jakarta: Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi.
- Soyomukti, N. (2012). *Soekarno dan Cina*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Subkhan, E. (2018). Ideologi, Kekuasaan, dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 78–88. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/25371>.
- Wirayuda, A. W. (2016). Peran Partai Masjumi dalam Dinamika Perkembangan Demokrasi di Kota Surabaya 1945-1960. *MOZAIK*, 16(1), 102–122. Retrieved from <https://doi.org/10.20473/mozaik.v16i1.10222>.